

Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Muhammad Rizaldi¹, Dadan Kurniansyah², Haura Atthahara³

Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Article Info

Article history:

Accepted: 08 Juny 2023

Publish: 07 July 2023

Keywords:

Local Wisdom Education, policy

Article Info

Article history:

Diterima: 08 Juni 2023

Terbit: 07 Juli 2023

Abstract

Local Wisdom Education is one of the programs carried out by the Purwakarta Regency Government with the Purwakarta Regency Education Office which was started by the previous Purwakarta Regent, Dedi Mulyadi. This Local Wisdom Education program is based on awareness and concern for cultural arts. The method used in this research is qualitative with the intention of providing an overview of the policy of strengthening local wisdom-based character education in Purwakarta Regency. As according to William Dunn, there are five policy stages, namely the initial agenda setting stage, the policy formulation stage. This research is also based on these five functions. The existence of this local wisdom education program is highly approved by parents because it can foster a sense of love for local culture.

Abstrak

Pendidikan Kearifan Lokal merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang dimulai sejak Bupati Purwakarta terdahulu, Dedi Mulyadi. Program Pendidikan Kearifan Lokal ini didasari karena adanya kesadaran dan kepedulian terhadap seni budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan maksud memberikan gambaran tentang kebijakan penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana menurut William Dunn, terdapat lima tahap kebijakan yaitu Tahap penyusunan agenda awal, Tahap formulasi kebijakan. Penelitian ini pun berlandaskan dengan lima fungsi tersebut. Adanya progam pendidikan kearifan lokal ini, sangat disetujui oleh orang tua murid karena dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Muhammad Rizaldi

Universitas Singaperbangsa KarawangEmail:

muhammadrizaldi8343@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental bagi kemajuan setiap bangsa. Pendidikan yang baik memang menjadi tujuan setiap negara agar setiap warga dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang baik dan terstruktur dipercaya menjadikan masyarakat nya memiliki pemikiran yang maju, memiliki rasa kreatifitas yang tinggi dan inovasi yang cemerlang. Perencanaan-perencanaan dilakukan agar dapat menemukan metode yang tepat untuk diterapkan dalam bidang pendidikan. Tak ayal banyak sekali perubahan-perubahan inovasi yang terjadi dalam dunia pendidikan ini baik dalam tujuan yang akan dicapai maupun upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Semua perubahan itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu, teknologi, seni atau estetika, religi, dan globalisasi. Setiap sistem pendidikan memang dirancang untuk cocok atau dapat diterapkan pada zaman yang ada. Karena dikhawatirkan terdapat nila-nilai yang tidak sesuai dengan masyarakat dan sistem pendidikan, yang dibutuhkan yaitu yang dapat

menumbuhkan rasa cinta kepada budaya daerah dan jati diri sebagai warga negara Indonesia yang memiliki nilai kebudayaan yang sangat tinggi karena tak dapat dipungkiri lagi saat ini zaman globalisasi memiliki arus yang sangat kuat yang dapat memberikan dampak nyata pada perkembangan anak usia sekolah.

Dengan adanya pendidikan kearifan lokal inilah diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, rasa bangga, dan dapat menerapkan nilai luhur dari kebudayaan yang dimiliki. Namun, pendidikan yang mengusung kearifan lokal ini belum menjadi program nasional pendidikan. Tetapi, pemerintah Kabupaten Purwakarta menyadari bahwa kebudayaan dan nilai estetika yang dimiliki didalamnya sangatlah penting untuk pembelajaran siswa maupun tenaga pengajar karena terdapat nilai-nilai luhur. Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Dinas Pendidikan menerapkan program tersebut karena yakin akan memberikan dampak yang positif dan kemajuan yang akan dirasakan pada bidang pendidikan dan meningkatkan kualitas dasar siswa (daya pikir, daya hati, daya fisik) di Purwakarta. Karena jikalau hanya memfokuskan pada kemajuan teknologi yang berharap agar adanya kemajuan dalam bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Purwakarta merasa hal tersebut malah akan melupakan seni budaya yang dimiliki, melupakan dari mana kita berasal. Dalam hal ini bukan berarti pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Dinas Pendidikan menolak akan adanya globalisasi dan penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan, akan tetapi ingin lebih selaras lagi antara kearifan lokal yang masih dipertahankan dengan kemajuan teknologi.

Untuk program pendidikan kearifan lokal yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Dinas Pendidikan ini menjadi salah satu program unggulan dan sangat diperhatikan dalam setiap proses-proses nya. Supaya program unggulan ini berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan pun melakukan kerjasama dengan dinas-dinas lain seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Untuk mensukseskan pendidikan kearifan lokal, Dinas Pendidikan membuat berbagai peraturan guna mendidik para pelajar berdasarkan PPK (Pengembangan Pendidikan Karakter) dan GDS (Gerakan Disiplin Siswa) yang merupakan bagian dari GDN (Gerakan Disiplin Nasional) yang mana merupakan salah satu program nasional. Program pendidikan kearifan lokal ini merupakan refleksi yang bersumber pada Nawacita yang diusung oleh Presiden Joko Widodo. Dengan menggunakan metode kualitatif, jurnal ini akan menjelaskan perihal pendidikan kearifan lokal Kabupaten Purwakarta yang merupakan program unggulan

2. METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2003:23) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Sedangkan metode kualitatif deskriptif yang ditetapkan oleh Suharsimi Arikunto (2005) adalah untuk mengumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2003:23) bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel yang lain (Arifin, Z. 2020:55).

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Sedangkan metode deskriptif kualitatif yang ditetapkan oleh Arikunto (2005) adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari kualitatif deskriptif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan antar korporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak bekerja dengan menggunakan data dalam bentuk atau ditransformasikan menjadi bilangan atau angka, tidak boleh dengan rumus dan tidak ditafsirkan/diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematik,

secara umum metode deskriptif bertugas untuk melakukan representatif objek mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam penelitian (Yuliani, W. 2018:83).

Informan penelitian ini adalah orang tua murid dan aparat/pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Informan tersebut ditentukan secara *purposive*. Menurut Sugiyono (2011:216) *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Pertimbangan yang dimaksud yaitu informan yang merupakan aparat/pegawai sebagai pemangku kebijakan dan para siswa yang menjalankan kebijakan dari Dinas Pendidikan. Pengumpulan data terdiri dari wawancara, teknik dokumentasi, dan observasi, sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Penyusunan agenda awal

Penyusunan agenda menurut William Dunn (Rushananto, 2014) adalah para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Penyusunan agenda awal sebuah kebijakan disini sangatlah menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, konflik dan modal sosial yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam membuat sebuah kebijakan. Penyusunan agenda awal dimulai dimana di Kabupaten Purwakarta terdapat permasalahan-permasalahan siswa yang dapat menyebabkan berkurangnya rasa cinta terhadap budaya lokal diantaranya marak terjadinya tawuran antar pelajar sekolah, banyak siswa yang mengkonsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang, penggunaan teknologi yang berlebihan, penggunaan kendaraan bermotor oleh para siswa padahal mereka belum memiliki SIM, dan ada juga siswa yang melakukan begal mobil (BM) pada saat pulang sekolah. Hal-hal seperti ini apabila terus dibiarkan akan merusak moral para siswa dan hal yang seperti ini harus dihilangkan supaya tidak merusak moral para siswa penerus bangsa.

Kebijakan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini muncul karena ada nya PERBUP No.69 Tahun 2015 ini berawal dari inisiatif bupati Kabupaten Purwakarta pada saat itu, dimana pada tahun 2014 pak Dedi melihat marak nya kenakalan-kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar sekolah, banyak juga siswa-siswa yang mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, penggunaan teknologi informasi di kalangan siswa yang berlebihan, menggunakan kendaraan ketika masih belum memiliki SIM, banyak para pelajar yang bolos pada jam sekolah serta banyak juga siswa yang melakukan begal Mobil (BM) pada saat pulang sekolah. Maka dari itu dibuat kebijakan pendidikan karakter ini yang mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten yaitu "Purwakarta Berkarakter" dan pada tahun 2015 dibuatlah PERBUP NO. 69 tersebut Tentang Pendidikan Karakter. Dengan Tujuan adanya program ini agar masyarakat Kab. Purwakarta memiliki budi pekerti yang adi luhur; melatih peserta didik untuk melaksanakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui pembelajaran di sekolah; menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dari rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua dari peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang seluas-luasnya; serta sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan pada proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah

2. Tahap Formulasi Kebijakan

William Dunn (Rushananto, 2014) mengatakan bahwa dalam tahap Formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan

masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Pada saat ini dunia pendidikan harus menghadapi masalah yang kompleks baik masalah dari dunia pendidikan sendiri maupun masalah dari luar dunia pendidikan; tawuran antar pelajar, siswa terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang dan berbagai macam bentuk kenakalan para siswa yang lainnya, itu semua merupakan sebuah bukti nyata bahwa adanya kesenjangan antara masyarakat dengan dunia pendidikan. Perlu adanya reformasi pendidikan dari waktu ke waktu tanpa henti yang berpegang pada tantangan masa depan yang penuh dengan persaingan global.

Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai kearifan lokal baik yang bersifat geografis, teritorial maupun yang bersifat *capacity intellectual*. Hal ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi potensi domestik, baik yang bersifat kultur, regional, lokal maupun menciptakan keunggulan personal yang memiliki kearifan intelektual, emosional dan spiritual, sehingga dapat membentuk generasi muda yang sesuai dengan tata nilai: cageur, bageur, bener, pinter jeung singer. Konsep pendidikan karakter berbasis kearifan lokal tersebut di terapkan di Kabupaten Purwakarta.

PERBUP No.69 dan Kebijakan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini dibuat atas inisiatif bupati Kabupaten Purwakarta saat itu Kang Dedi Mulyadi, dimana pada saat pembuatan kebijakan tersebut melibatkan semua stake holder ada dari perwakilan sekolah swasta, perwakilan perguruan tinggi, BAPPEDA tentunya sebagai badan perencanaan dan dari pihak sekolah juga dilibatkan seperti kepala sekolah, guru, dewan pendidikan serta organisasi mitra pendidikan PGRI lalu masyarakat juga dilibatkan melalui perwakilan ORMAS terkait dan para tokoh masyarakat

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dalam tahap ini William Dunn (Rushananto, 2014) menjelaskan bahwa dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan. Untuk Kebijakan 7 poin istimewa ini tidak diadopsi dari program pendidikan karakter di daerah manapun bahkan Kabupaten Purwakarta merupakan daerah pertama yang menerapkan kebijakan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Indonesia, jika berdasarkan lahirnya PERBUP NO 69 tahun 2015 Tentang pendidikan karakter Kabupaten Purwakarta merupakan pelopor pendidikan karakter berbasis kearifan lokal skala lokal. Lalu kebijakan ini juga mendapat dukungan dari banyak pihak atau lembaga lembaga terkait serta menjadikan kebijakan ini sebagai kebijakan prioritas.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut William Dunn (Rushananto, 2014) suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini perlu dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana sebuah kebijakan yang telah ditetapkan perlu badan/lembaga administratif untuk melaksanakan kebijakan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan pendidikan karakter dilakukan oleh

Dinas Pendidikan dilakukan di semua sekolah-sekolah Kabupaten Purwakarta tentu dengan bantuan dan dukungan dari pihak atau lembaga lainnya seperti Polres dimana peran Polres dimaksudkan untuk merazia para siswa yang membawa kendaraan bermotor namun tidak memiliki SIM, kerjasama dengan dinas-dinas lain seperti Dinas Sosial yang turut berperan jika ada siswa yang melakukan bolos di jam sekolah, Dinas Kesehatan untuk membantu jika ada siswa yang mengonsumsi obat-obatan terlarang maupun minuman keras, Dinas Perhubungan untuk membantu lancar nya lalu lintas saat pagi hari siswa berangkat ke sekolah.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini William Dunn (Rushananto, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan yang telah dijalankan Akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Setelah evaluasi dilakukan maka tujuan kebijakan berikutnya adalah memberi rekomendasi kebijakan berupa keputusan tentang masa depan dari kebijakan tersebut.

Terdapatnya ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta, untuk evaluasi program 7 poin atikan sendiri dilakukan setiap hari. Untuk evaluasi keseluruhan itu dilakukan setiap 1 semester sekali atau 6 bulan sekali untuk menilai keberhasilan para pelaksana program 7 poin atikan, untuk membantu proses pengawasan selanjutnya melakukan evaluasi kebijakan 7 poin atikan Dinas Pendidikan membentuk Tim GDS atau Gerakan Disiplin Siswa yang berfungsi untuk menjaga pelaksanaan dari 7 (tujuh) Poin Atikan Pendidikan Purwakarta ini serta mengawasi aturan yang menyelenggarakan dari regulasi yang ada. Tim GDS dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tim advokasi. Tim advokasi ini siap ditempatkan, ketika terjadi pelanggaran, maka tim advokasi yang bergerak. Tim GDS dan tim Advokasi ini bekerja sama dalam mengawasi program ini. Melainkan berkeliling mendatangi setiap sekolah. Misalnya, jika ada siswa SMP yang membawa handphone ke sekolah, handphone itu di ambil kemudian di simpan di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Kemudian, orang tua siswa yang harus mengambil handphone tersebut di Disdik. Selain itu, apabila ada siswa yang membawa motor ke sekolah, motornya dirajai lalu dibawa ke Polsek apabila siswa tersebut tidak mempunyai SIM. Namun, hal ini menjadi pelanggaran untuk daerah pelosok yang tidak dilintasi oleh angkutan umum. Contohnya di daerah Pasir Angin, di SD Margaluyu Kecamatan Kiara Pedes.

Adapun program yang dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Kabupaten Purwakarta adalah diwujudkan dengan program 7 (tujuh) Poin Atikan Pendidikan Purwakarta yaitu sebagai berikut:

a. Hari Senin: *Ajeng Nusantara*

Ajeng Nusantara adalah momentum dalam rangka mewujudkan generasi muda yang mengenal akan nusantaranya (negaranya), cinta tanah airnya dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat melalui pembiasaan wawasan nusantara sehingga melahirkan sikap nasionalisme yang kokoh ditengah-tengah ancaman negara lain yang ingin merecoki bahkan mengobok-ngobok bangsa yang bhineka ini. Pada intinya *Ajeng Nusantara* ini bertujuan menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar akan mampu berdiri tegak sebagai bangsa yang maju dan beradab.

Langkah strategis: Pada hari senin itu, seluruh guru dapat menyampaikan berbagai hal tentang Indonesia; tentang hamparan nusantara dan keunggulannya. Guru dengan berbagai latar mata pelajaran yang dibawakannya, harus mampu mensinergikan apa yang menjadi bahan pembelajaran kepada siswanya dikaitkan dengan keunggulan Nusantara.

Contohnya, Guru Bahasa Inggris harus mampu menceritakan berbagai hal tentang suku Asmat, yang diceritakan dengan kemampuan Bahasa Inggris guru tersebut. Guru

Biologi mampu bagaimana mengamati dan menjelaskan kepada siswa tentang sel hidup dari kerajaan-kerajaan nusantara, dari berbagai jenis suku adat yang menempati nusantara ini. Guru Kimia, Fisika, Matematika menghitung berapa cadangan sumberdaya energi yang dimiliki di pulau Kalimantan, apa saja yang menjadi sumber mineral unggulannya. Demikian pula dengan guru Bahasa Indonesia, guru sejarah, guru mata pelajaran lainnya mampu menjelaskan potensi tanah Papua, tanah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga pulau Rote.

Guru juga diharapkan bisa membuka kembali wawasan tentang nusantara dengan berbagai cara, dengan meningkatkan minat baca buku wawasan nusantara, penggunaan internet, browsing melalui google dan penggunaan teknologi lainnya. Sehingga dari pembelajaran Ajeg Nusantara, diharapkan akan melahirkan siswa yang mumpuni pengetahuan wawasan nusantara dan potensinya. Lambat laun, siswa merasa bangga sebagai bagian dari negara yang memiliki potensi kekayaan berbagai hal dan siswa berani berdiri tegak dengan penuh percaya diri untuk menatap masa depannya dengan segudang angan dan cita-cita mulia membangun tanah nusantara, memanfaatkan ilmu dan keahliannya untuk kemajuan nusantara.

b. Hari Selasa: *Mapag Buana*

Mapag artinya menjemput, dan buana adalah dunia. Secara harfiah, Mapag Buana berarti memperluas wawasan terhadap dunia.

Langkah strategis: Pada hari Selasa, pendidikan lebih diarahkan pada pengenalan berbagai kanzah ilmu dunia. Bahasa yang dipergunakan sebagai komunikasi di sekolah diharapkan menggunakan bahasa internasional (bahasa Inggris).

c. Hari Rabu: *Maneuh di Sunda*

Pengertian *Maneuh di Sunda* merupakan hari yang mengandung makna kembali pada identitas dan jati diri sebagai seorang Sunda. Di tengah arus modernisme, nilai dan budaya Sunda mulai tergerus. Kondisi ini memprihatinkan, dimana generasi muda lupa akan identitasnya ini. Hal ini merupakan suatu bentuk ikhtiar yang konkrit dalam rangka menghidupkan kembali nilai dan budaya Sunda agar eksistensinya tidak terkikis oleh perubahan jaman.

Langkah strategis: Pada hari Rabu, siswa dan guru menggunakan pakaian sunda, pakaian tradisi pangsi/kampret lengkap dengan iket untuk siswa dan guru laki-laki dan kebaya lengkap dengan sampung kebat bagi siswa dan guru perempuan. Guru mengenalkan nilai hidup orang sunda. Siswa mempelajari kampung adat mana saja yang masih memegang teguh tradisi sunda, seperti halnya baduy, kasepuhan adat cipta gelar, kasepuhan adat sinar resmi cisolok sukabumi, kampung naga dan lainnya. Guru juga membahas tradisi sunda dari cara bercocok tanamnya, sistem pertanian yang digunakan, jenis kulinernya, termasuk seni tradisi dari mulai seni musik, seni karawitan, seni tari dan seni tradisi lainnya yang memperkaya budaya sunda.

d. Hari Kamis: *Nyanding Wawangi (Hari Estetis)*

Kebebasan berkespresi menjadi suatu hal yang mendapat perhatian khusus di Kabupaten Purwakarta. Pengetahuan siswa yang sudah mengenal jati diri budayanya, membuka cakrawala nusantara dan telah mengarungi dunia, maka ia akan naik pada tingkatan selanjutnya sebagai siswa yang siap hidup merdeka, belajar tanpa batas, membuka jendela ilmu dengan kemampuan dirinya sendiri. Dengan adanya *Nyanding Wawangi* yang mengandung makna memberikan ruang untuk kebebasan berkespresi, disini daya, rasa, dan karsa siswa terbuka untuk menggali potensi dan kreatifitasnya sehingga akan menjadi hari yang penuh dengan kebebasan berekspresi dengan peserta didik.

Langkah strategis: Belajar sastra, belajar rasa, dan tentu budi pekerti melalui pembiasaan yang terus menerus dilakukan melalui sekolah sebagai miniatur pusat peradaban. Nilai-nilai keindahan diciptakan dalam ruang kelas. Guru geografi dapat bercerita tentang alam semesta, dunia antariksa, tentang bulan dan tentang bintang. Guru-

guru lainnya, melalui pembelajaran dengan penghayatan sastra. Siswa dituntut untuk berkreasi dan inovasi dalam setiap pembelajarannya, misalkan menuangkan kritiknya pada guru namun dengan penyampaian bahasa puisi, agar yang dilahirkan keindahan dan saling menghargai.

Selain itu, setiap hari Kamis ada gerakan *beas kaheman*. Setiap siswa yang berasal dari keluarga mampu, dianjurkan untuk membawa beras minimal segelas. Dikumpulkan lalu disumbangkan ke masyarakat yang kurang mampu. Kabupaten Purwakarta sudah tidak menerima/menolak *raskin* (beras miskin) karena menurut Bapak Dodi Winandi kualitas beras miskin (*raskin*) itu kurang bagus. Dari sumbangsih dari sekolah itu, dijadikanlah adanya ATM beras yang berada di Kecamatan Bungur Sari Desa Wanakerta. Masyarakat yang kurang mampu sudah mempunyai kupon untuk mengambil beras di ATM beras tersebut.

e. Hari Jum'at: *Nyucikeun Diri*

Nyucikeun diri (mensucikan diri) berarti mendekatkan hati, jiwa dan pikiran kepada Yang Maha Kuasa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mensucikan diri, mulai dengan melakukan kontemplatif atas apa yang telah dilakukan hidup pada hari-hari sebelumnya. Termasuk memper-kuat nilai-nilai ritualitas dan spiritualitas.

Langkah strategis: Guru mengajak siswa melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama.

f. Hari Sabtu-minggu: *Betah di Imah*

Hari ketujuh siswa diajak agar mencintai rumah sebagai tempat bernaung keluarga. *Betah di Imah* merupakan pembiasaan yang memiliki nilai agar siswa dekat dengan keluarganya dan dapat berinteraksi sehingga tertransformasi nilai-nilai kebatinan antar anggota keluarga yang ada di rumah terutama dengan kedua orang tua yang merupakan tempat pendidikan yang paling pertama dan utama. Disamping dekat dengan keluarga diharapkan siswa juga dapat bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Langkah strategis: Sabtu-minggu guru tidak memberikan tugas apapun kepada siswa.

Berdasarkan buku panduan penerapan pendidikan karakter di sekolah yang disusun dan diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan dalam empat ranah sebagai berikut:

- a. Pengajaran dan Pembelajaran;
- b. Pengembangan Budaya Sekolah (School Culture) dan Pusat Kegiatan Belajar;
- c. Ko-kurikuler dan Ekstra-kurikuler;
- d. Kegiatan Keseharian di Rumah dan di Masyarakat.

Nilai-nilai karakter yang hendak dikembangkan di sekolah lewat program pendidikan karakter berbasis kearifan lokal menurut Kemendiknasa tahun 2010, yaitu sebagai berikut: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab.

Ketika akan merealisasikan program pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini, di tahun pertama, Bapak Dedi Mulyadi mengundang para budayawan, tokoh-tokoh Islam, dan tokoh sejarah. Di tahun kedua, Bapak Dedi mengundang para pejabat daerah dan kepala sekolah. Di tahun ketiga, Bapak Dedi Mulyadi mengundang para pejabat, kepala sekolah dan para guru. Sampai akhirnya, Bapak Dedi Mulyadi mengundang rekan-rekan yang ada di luar Kabupaten agar bersama-sama mengetahui program 7 (*tujuh*) *poetik* pendidikan Purwakarta ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan

dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Agenda awal pembuatan kebijakan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini berawal dari inisiatif bupati Kabupaten Purwakarta pada saat itu, Bapak Dedi Mulyadi dimana pada tahun 2015 pak Dedi melihat maraknya kenakalan-kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar sekolah, menggunakan kendaraan ketika masih belum memiliki SIM, dan banyak nya para pelajar yang bolos pada jam sekolah. Maka dari itu dibuat kebijakan pendidikan karakter ini yang mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten yaitu “Purwakarta Berkarakter.

PERBUP No.69 dan Kebijakan pendidikan karakter berbasis kearifan local yang dibuat atas inisiatif bupati Kabupaten Purwakarta yang melibatkan semua stake holder ada dari perwakilan sekolah swasta, perwakilan perguruan tinggi, serta BAPPEDA. Sangat efektif untuk dilaksanakan demi memperkuat rasa cinta terhadap budaya lokal

Kebijakan pendidikan karakter berbasis kearifan local di Kabupaten Purwakarta tidak diadopsi dari kebijakan di daerah lain di Indonesia.

Impelementasi kebijakan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal berjalan sangat baik dan efektif sehingga dapat bertahan dari tahun 2015-2023.

Sudah sangat baik dilakukan nya evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta karena evaluasi dilakukan setiap harinya.

SARAN

Bedasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya maka saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengarahan dan pemberitahuan terlebih dahulu pada saat penyusunan agenda awal terkait kebijakan yang akan di buat agar tidak ada nya pro dan kontra dari orang tua siswa.Tingkatkan sinergitas dalam setiap bidang yang terdapat dalam dinas pendidikan;
2. Tingkatkan sinergitas antar anggota di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada saat memformulasikan kebijakan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Melibatkan tenaga pendidik dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
4. Memberikan pengajaran atau pengarahan kepada guru yang masih kebingungan dalam implementasi ide mengenai pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.
5. Rutin evaluasi pada setiap lini pendidikan dan Sesekali libatkan tokoh masyarakat atau guru pada saat evaluasi agar lebih transparan

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segalarahmat dan karuniannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang telah mendorong dalam menyelesaikan artikel ini, terutama terima kasih kepada Dadan Kurniansyah. S.IP.,M.Si dan Haura Atthahara S.IP.,M.IP, penyunting, penyunting ahli dan ketua penyunting dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan dan arahan yang menyempurnakan artikel ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Gianti, Yus Nugraha, Marina Sulastiana, and Diana Harding. 2018. “Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Purwakarta.” *Humanitas (Jurnal Psikologi)* 1(3): 147.
- Mislikhah, St. 2020. “Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal.” *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman* 11(2): 17–34.
- Ngamanken, Stephanus. 2014. “Pentingnya Pendidikan Karakter.” *Humaniora* 5(1): 72.
- nugrahani farida. 2014. “Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.” *信阳师范学院* 1(1): 305.
<http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/artic>

le/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0A
www.iosrjournals.org.

- Nurkholis. 2013. "PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI Oleh:
Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen
Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto." 1(1): 24–44.
- Rushananto. 2014. "Kebijakan Publik." *Kebijakan Publik* (1993): 15